



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
banasa

*Laporan kinerja  
instansi pemerintah  
LKJiP Tahun 2023*



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu satu Pintu Kota Dumai*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Isu-isu Strategis .....	6
1.5 Cascading Kinerja .....	7
1.6 Peta Proses Bisnis .....	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Tujuan dan sasaran	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS.....</b>	<b>20</b>
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	22
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	26
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	30
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)	31
3.5 Akuntabilitas keuangan	32
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	34
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.8 Prestasi dan Penghargaan	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>38</b>

## DAFTAR LAMPIRAN .....

1. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas.....	40
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	41
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan.....	44
4. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	47
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	48
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	51
7. Penghargaan (jika ada)	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional	4
Tabel 1.2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Dumai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2.3 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.7 Saran/Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Sakip DPMPTSP 2023	9
Tabel 1.7.2 Tindak lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Sakip DPMPTSP 2023	10
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai	14
Tabel 2.3.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023	15
Tabel 2.3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai	16
Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023	17
Tabel 2.4.2 Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023	18
Tabel 2.4.3 Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja	22
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	23
Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	30
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	32
Tabel 3.5 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	33
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	35
Tabel 6.1 Prestasi dan Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023	37

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai	3
Gambar 1.5 Cascading Kinerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai	7
Gambar 1.6 Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai	8
Gambar 2.1 Misi Pemerintah Kota Dumai 2021 - 2026	12
Gambar Kegiatan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha	39
Gambar Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha	39
Gambar Pelayanan Terhadap Pelaku Usaha	39

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Telayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DUMAI



**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19660724 198602 1 002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka sebagai unsur teknis, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

melaksanakan MISI yang ke 1 dan ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. yaitu “ Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Industri “ dan “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik” SASARAN yang ke 1 dan 5 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya pertumbuhan Investasi dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** “

Secara umum Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.  
Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.  
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- II. Program Promosi Penanaman Modal
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.  
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

### III. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

### IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

### V. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Dumai pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan
2.	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9.450.000.000.000 (Rupiah)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	81

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 962.689.650,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2  
Program Kerja dan Penganggaran  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Dumai  
Tahun 2023

NO.	PROGRA M	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 90.000.000	Dana Alokasi Umum
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 38.279.150	Dana Alokasi Umum
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 79.761.100	Dana Alokasi Umum
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 73.068.000	Dana Alokasi Umum
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 9.681.400	Dana Alokasi Umum
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 290.789.650</b>	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 20 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 255.000.000	Dana Alokasi Umum
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 38.279.150	Dana Alokasi Umum
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 159.761.100	Dana Alokasi Umum
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 499.968.000	Dana Alokasi Umum Dan DAK Non Fisik
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 9.681.400	Dana Alokasi Umum
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 962.689.650</b>	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan	2 (Perusahaan)	200%	√			
2.	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9.450.000.000.000 (Rupiah)	3.386.922.760.000 (Rupiah)	35%				√
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	81 (Indeks)	95,40 (Indeks)	118%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori Sedang ( $66 \leq 75$ ) yaitu Cukup Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.873.362.971 (*Sebelas Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.901.230.971 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 972.132.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

1 Belanja Operasi	:	10.901.230.971
2 Belanja Modal	:	972.132.000
<b>J u m l a h</b>	:	<u>11.873.362.971</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Kota  
Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,36 %	0 %	0			
Sasaran : Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA )	1 Perusahaan	2 Perusahaan	200	293.279.150	265.851.610	75,80
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	40,26%	40,26%	100	255.000.000	244.524.600	95,89
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	10 %	10	200	38.279.150	21.327.010	55,71
Sasaran : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	9.450.000.000.000,-	3.386.922.760.000, -	35	499.968.000	370.519.014	74,11
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi Kota Dumai	100 %	35 %	35	499.968.000	370.519.014	74,11

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan	B	A	100	169.442.500	168.501.500	99,42
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	95,54	118			
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	80 %	1.200 Pemohon	100	159.761.100	158.840.000	99,42
Program : Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	100 %	25%	25	9.681.400	9.661.500	99.79

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6  
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KET
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	200	75,80	√		
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	35	74,11		√	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	118	99,42	√		

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) persentase tingkat efisiensinya adalah 2,64% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (200%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (75,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) persentase tingkat efisiensinya adalah 0,74% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (35%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (74,11%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.

3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase tingkat efisiensinya adalah 1,18% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntable terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab ( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

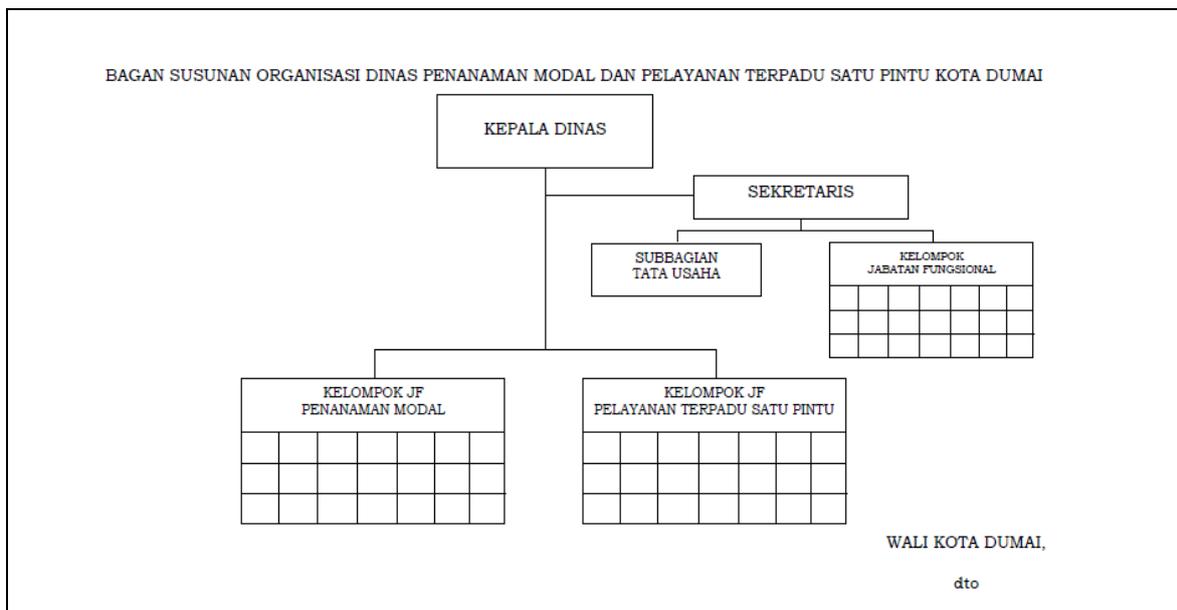
- f. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

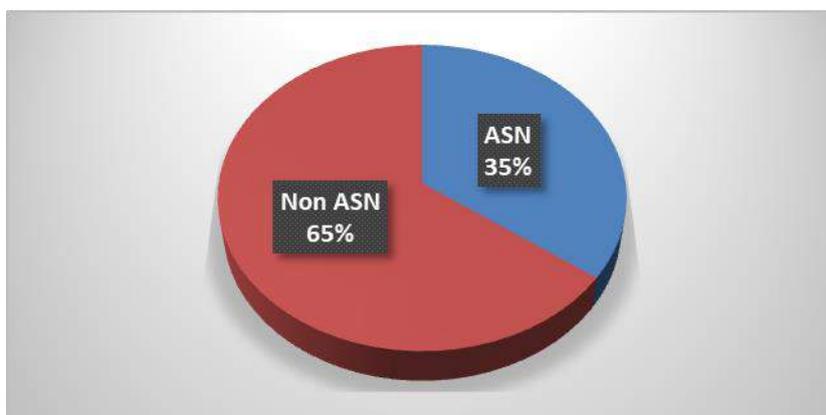
**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai**



Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai sebanyak 91 orang, yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di topang oleh 61 orang tenaga Non PNS. Yang mana sumber daya manusia tersebut terdiri dari beberapa komposisi sebagai berikut :

**Grafik 1.2.**

**Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian**



**Tabel 1.2.1**

**Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional**

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
4	JF Perencana Ahli Muda	1
5	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1
6	Kelompok JF PTSP	
	- JF Penata Perizinan Ahli Madya	2
	- JF Penata Perizinan Ahli Muda	5
7	Kelompok JF Penanaman Modal	
	- JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	3
	- JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	7
8	Pelaksana	10

**Tabel. 1.2.2**  
**Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Dumai**  
**Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	IV	8	25
2	III	22	68,75
3	II	2	6,25
4	I	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

**Tabel. 1.2.3**  
**Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Dumai**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2023	
		JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	Sarjana Strata 2 (S2)	3	10
2	Sarjana Strata 1 (S1)	21	65
3	Sarjana Muda (D3)	1	4
4	SLTA sederajat	7	21
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan jika dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang sedemikian besar maka akan terlihat jelas kekurangan jumlah pegawai. Hal ini mengakibatkan volume kerja pegawai yang ada menjadi lebih tinggi sehingga dianggap perlu perekrutan tenaga Non ASN. Dengan kondisi yang tidak ideal ini mengakibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan belum bisa berjalan secara optimal.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **1.4 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang perlu ditangani sbb:

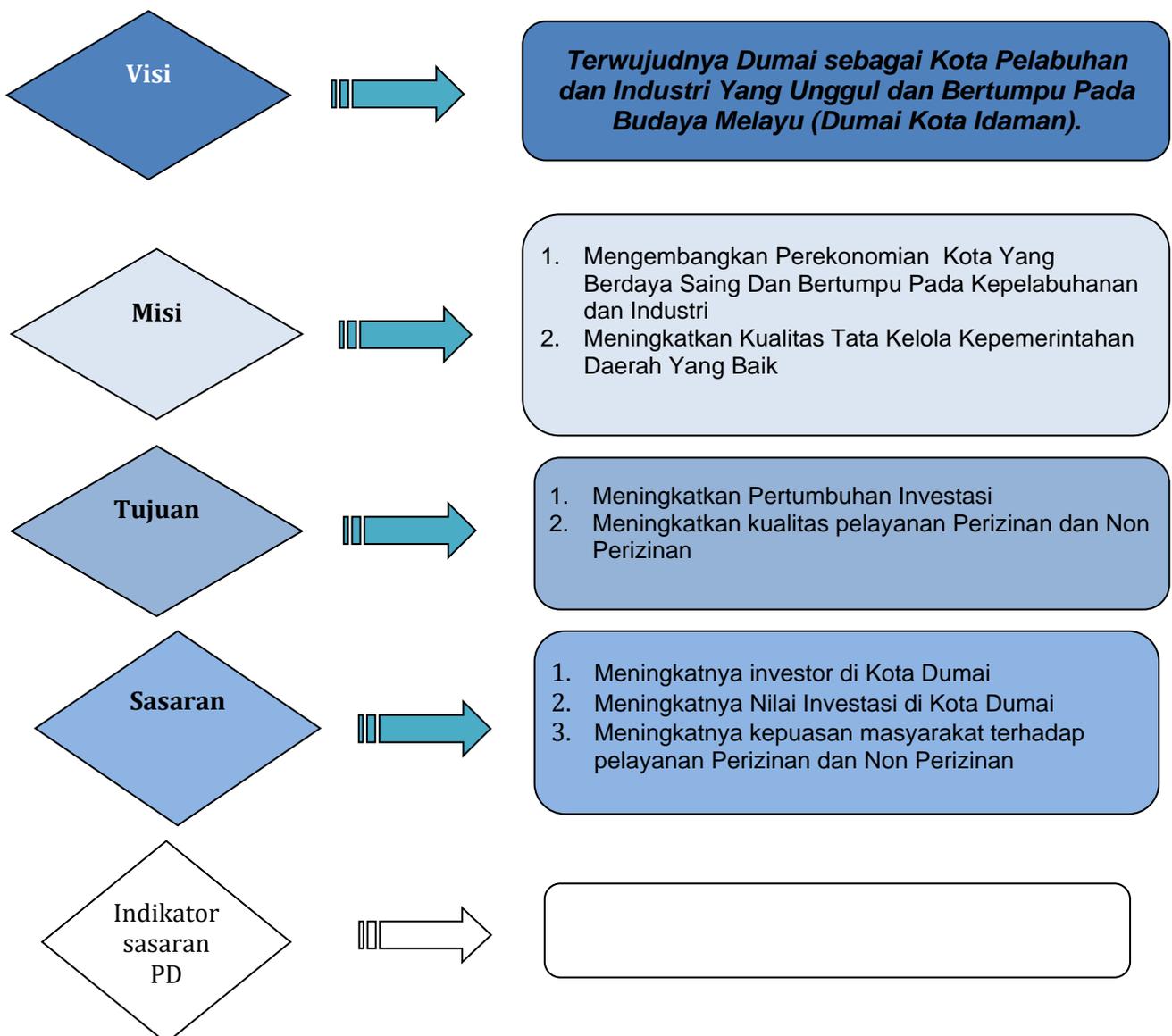
1. Masih kurangnya jumlah SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pelaku usaha.
2. Belum tersedianya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang secara On Line terkait perizinan dan Non Perizinan yang tidak terakomodir di OSS Berbasis Resiko
3. Belum adanya regulasi terkait rencana umum penanaman modal dan potensi yang dimiliki Kota Dumai
4. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berusaha di Kota Dumai
5. Belum adanya rencana strategis terkait promosi dalam rangka penyebarluasan Informasi tentang peluang investasi serta SDM yang mumpuni terkait promosi investasi.
6. Masih terbatasnya SDM dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada.

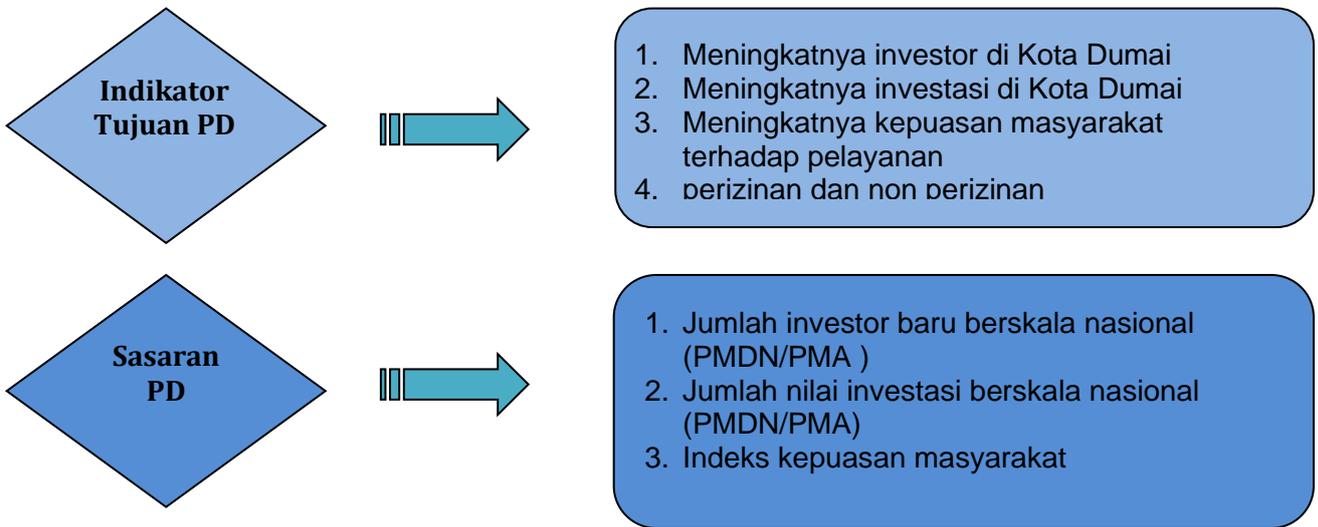
## 1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.5

Cascading Kinerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai



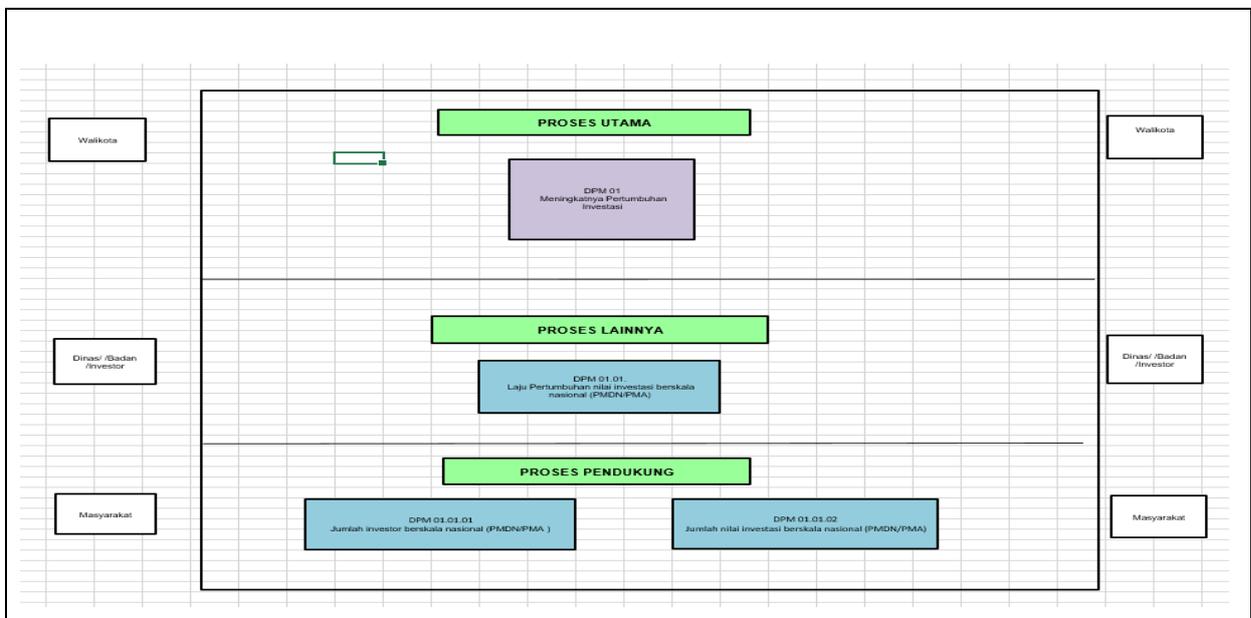


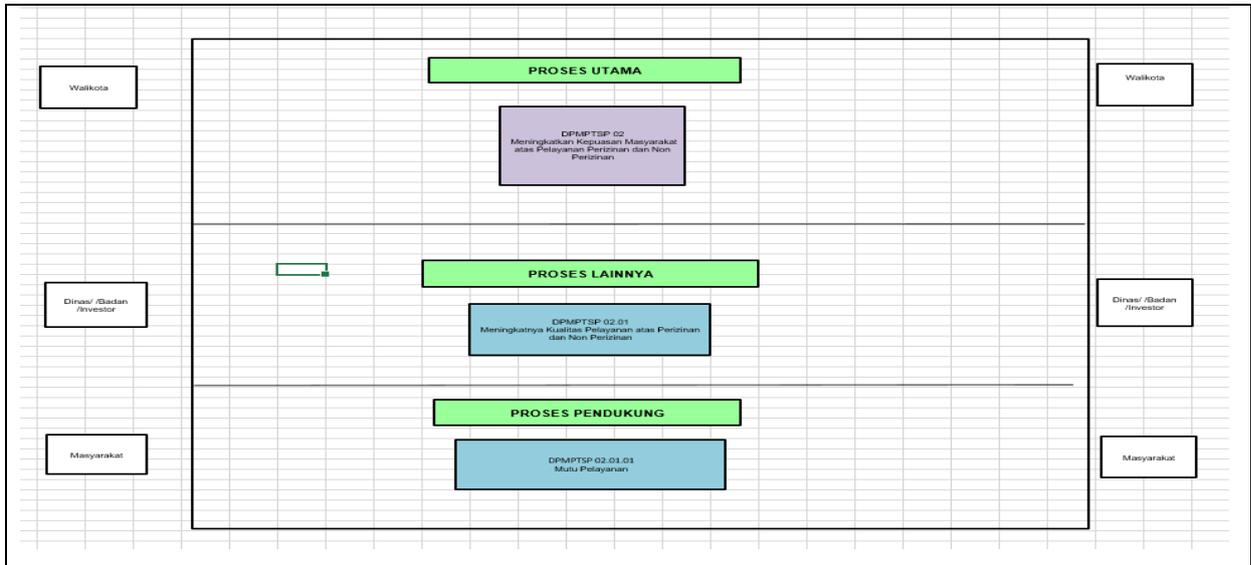
### 1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.6

Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai





### 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1314.1/INSP-S. Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.7

Saran/Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Sakip DPMPTSP 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Agar setiap pegawai pada DPMPTSP Kota Dumai perlu menetapkan rencana aksi yang mendukung capaian kinerja serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut secara berkala
2.	Pelaporan Kinerja	DPMPTSP Kota Dumai melakukan publikasi secara tepat waktu di masa yang akan datang
3.	Perencanaan Kinerja	DPMPTSP Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integritas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui crosscutting: dan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	DPMPTSP Kota Dumai perlu menyusun mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data dan pengukuran kinerja di masa mendatang

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.7.2

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Sakip DPMPTSP 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Mengarahkan seluruh pegawai DPMPTSP agar membuat rencana aksi yang mendukung capaian kinerja kedinasan	3 Bulan
2.	Mengarahkan bagian IT DPMPTSP agar meng Upload semua kegiatan dan dokumen ke dalam wibesite resmi DPMPTSP Kota Dumai	3 Bbulan
3.	Membuat pohon kinerja dan crosscutting DPMPTSP yang menggambarkan keterkaitan antar program dalam mencapai target kinerja DPMPTSP Kota Dumai	2 Bulan
4.	Menyusun Standar Opersional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data dalam pengukuran kinerja	3 Bulan

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

**2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”**

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu **“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian**

**Berlandaskan Gotong Royong**”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 ( Lima ) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1

Misi Pemerintah Kota Dumai 2021 - 2026

Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).

## 2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 ( lima ) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2  
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Industri					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Laju pertumbuhan nilai investasi berskala nasional	4,36	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan
			Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9.450.000.000.000 (Rupiah)
Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik					
Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu pelayanan (Kategori)	B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	81

### 2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

<b>Visi</b>	: <i>Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)</i>		
<b>Misi 1</b>	: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Startegi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan Pertumbuhan Investasi</b>	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Pemetaan Potensi Investasi Daerah	1. Menetapkan arah kebijakan Investasi Daerah 2. Menetapkan strategi promosi investasi daerah
	Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Dumai	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
<b>Misi 4</b>	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik e		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Startegi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik 2. Pemantapan Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembanagn Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)
2	Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Dumai	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1  
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA )	Perusahaan	1
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	9.450.000.000.000
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.533.075.211,- ( Sembilan Milyar Lima ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Sebelas Rupiah ) untuk melaksanakan 6 ( Enam ) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2  
Program kerja Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.242.285.561,-	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	90.000.000,-	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	38.279.150,-	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	79.761.100,-	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	73.068.000,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.681.400,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>9.533.075.211,-</b>	<b>APBD</b>

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 20 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3  
Program kerja kerja Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.910.673.321,-	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	255.000.000,-	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	38.279.150,-	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	159.761.100,-	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	499.968.000,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.681.400,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>11.873.362.971,-</b>	<b>APBD</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :  $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :  $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

b. Rumus :  $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel. 3.2  
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

### 3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.1 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realaisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA )	1	100	1	1	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	13.058.828.385.000	153.54	9.450.000.000.000	3.386.922.760.000	35	Tidak Berhasil
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85	105	81	95,40	118	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

- Jumlah Nilai investasi 2023 masih sampai Triwulan III

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)
  - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA ) menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 1 (satu) perusahaan realisasi sebesar 1 (satu) perusahaan, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1 (satu) perusahaan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tidak terjadi peningkatan atau masih sama dengan tahun lalu yakni sebesar 100%
  - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian** indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - Iklim Investasi Daerah yang Kondusif
    - Infrastruktur Sarana dan prasarana di daerah kawasan industri yang mendukung.
    - Faktor keamanan daerah sangat mendukung untuk pembangunan sebuah investasi.
  - c. **Faktor penghambat Capaian** Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut :
    - Masih terdapat kurang SDM di Bidang Penanaman modal terkait tenaga IT dibidang multi media.
  - d. **Tindak lanjut Capaian** Indikator indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut :
    - lebih meningkatkan promosi investasi terkait penanaman modal daerah.
2. Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)
  - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Rp. 9.450.000.000.000,- realisasi sementara sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 3.386.922.760.000,- tercapai 35% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 13.058.828.385.000,- atau tercapai sebesar 153,54%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar

125%

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terdapat sistim OSS dari pemerintah pusat yang memudahkan pihak swasta dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) adalah sebagai berikut :
- Tidak adanya pengembangan investasi dari perusahaan yang sudah beroperasi dikota dumai baik dari sisi pengembanaan kontruksi maupun peremajaan mesin – mesin produksi.
  - Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap progres kegiatan penanaman modal didaerah.
  - Masih kurangnya pelatihan dan Bimtek terkait pengawasan kegiatan penanaman modal bagi SDM yang ada.
  - Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM terkait badan usahanya.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) adalah sebagai berikut :
- Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah.
  - Lebih meningkatkan pelatihan dan Bimtek bagi ASN yang bertugas terkait penanaman modal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
  - Lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal aliran investasi yang masuk ke Kota Dumai.

### 3. Indikator Indeks kepuasan masyarakat

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 81 realisasi sebesar 95,40, tercapai 118 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 85 atau tercapai sebesar 105%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 89%
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indicator** Indeks kepuasan

masyarakat melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Semakin baiknya sarana dan Prasaran yang dimiliki terkait pelayanan
  - Semakin tingginya tingkat kesadaran terkait standar pelayanan dikalangan petugas pelayanan yang ada.
  - Semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan dalam rangka evaluasi perbaiki kedepan.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :
- Masih adanya masyarakat yang kurang mengertinya pengisian quisioner yang ada
  - Belum semua masyarakat yang memiliki handphone adroid terkait barcode pengisian pertanyaan terkait survey kepuasan.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :
- Lebih meningkatkan lagi pelayanan yang ada dalam rangka menuju pelayanan prima
  - Melakukan inovasi terkait pelayanan yang diberikan baik secara IT.

### **3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023**

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA )	1	1	1	1	100	100
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	505.000.000.000	9.450.000.000.000	13.058.828.385.000	3.386.922.760.000	153.54	35
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	81	81	85	95,54	105	118

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2023 terdapat Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai selama 5 tahun kedepan.

Indikator pertama adalah Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target pada tahun 2023 adalah 1 (satu) perusahaan berasal dari perhitungan realisasi tahun 2022 dibagi dengan jumlah realisasi target di tahun 2023 di kali dengan 100% (seratus persen). Untuk indikator ini baru terdapat di dalam renstra 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dan baru menjadi indikiator kinerja utama pada tahun 2022.

- b. Pada tahun 2022 dengan target 1 perusahaan dan kondisi iklim investasi yang bagus serta kepercayaan dunia usaha terhadap Kota Dumai terus meningkat berdampak dengan masuknya satu investor baru yang bergerak disektor pabrik kelapa sawit untuk menanamkan investasinya. Realisasi pada tahun 2022 adalah 1 (satu) perusahaan dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan.
  - c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 1 (satu) perusahaan dan realisasinya adalah 1 (satu) Perusahaan dengan rincian bertambahnya 1 perusahaan baru yang beroperasi di Kota Dumai dengan capaian kinerja Sangat Berhasil yakni 100%.
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) dengan target pada tahun 2023 adalah Rp. 9.450.000.000.000,-. berasal dari perhitungan target tahun 2023 dibagi dengan jumlah realisasi target di tahun 2023 di kali dengan 100% (seratus persen). Untuk indikator ini capaian kinerjanya termasuk kategori menurun.
  - b. Pada tahun 2022 dengan target Rp.8.505.000.000.000,- dan kondisi iklim investasi yang bagus serta kepercayaan dunia usaha terhadap Kota Dumai terus meningkat berdampak pada arus masuknya investasi ke Kota Dumai. Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.13.058.828.385.000,- dengan capaian 153,54% dari target yang telah ditetapkan.

c. Pada tahun 2023 target kinerja sebesar Rp. 9.450.000.000.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp. 3.386.922.760.000,- dan nilai investasi yang baru bisa dihitung sampai bulan Desember berdasarkan perhitungan Triwulan III Tahun 2023 dengan capaian kinerja tidak berhasil yakni 35%. Ada beberapa hambatan atau permasalahan dalam mencapai target kinerja tersebut yakni diantaranya sebagai berikut :

- Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap progres kegiatan penanaman modal di daerah.
- Masih kurangnya pelatihan dan Bimtek terkait pengawasan kegiatan penanaman modal bagi SDM yang ada.
- Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM terkait badan usahanya.

3a. Indikator Kinerja Yang ke tiga adalah Indeks kepuasan masyarakat.

dengan target pada tahun 2023 adalah 81 berasal dari perhitungan target tahun 2023 dibagi dengan jumlah realisasi target di tahun 2023 di kali dengan 100% (seratus persen). Untuk indikator ini capaian kerjanya termasuk kategori meningkat.

b. Pada tahun 2022 dengan target 81 dan yang mana pada waktu yang bersamaan DPMPTSP Kota Dumai pindah ke kantor sementara dalam rangka pembangunan kantor DPMPTSP Kota Dumai yang baru yang sekaligus akan di manfaatkan menjadi Mal Pelayanan Publik Kota Dumai hal mengakibatkan kurang nyamannya keberlangsungan pelayanan yang ada namun walaupun demikian secara keseluruhan DPMPTSP tetap berupaya memberikan pelayanan secara baik sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 85 dengan capaian 105% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori sangat berhasil.

c. Pada tahun 2023 target kinerja sebesar 81 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 95,54 dengan capaian kinerja sangat berhasil yakni sebesar 118%.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA )	1	1	100
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	9.450.000.000.000	3.386.922.760.000	35
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	81	95,54	118

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA ) sebagai berikut :
  - Melakukan Revisi terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  - Menyusun Peta Potensi investasi Daerah ;
  - Menyusun Regulasi terhadap pemberianfasilita/ Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
  - Penyusunan strategi promosi penanaman modal;
  - Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang tepat sasaran.

2. Capaian Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) sebagai berikut :
  - Melaksanakan kegiatan pengendalian terkait penanaman modal ;
  - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait LKPM ;
  - Melaksanakan kegiatan pengawasan terkait penanaman modal dan pelaporan LKPM ;
3. Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut :
  - Meningkatkan upaya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah ;
  - Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan dan non perizinan berbasis resiko;
  - Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko;
  - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.

### **3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional ( Target SPM )**

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional ( Target SPM ) sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1		Tidak Ada
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	13.058.828.385.000		Tidak Ada
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85		Tidak Ada

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.873.362.971 ( *Sebelas Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.901.230.971 ( *Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 972.132.000 ( *Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah* ).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.858.096.550 ( *Delapan Milyar Delapan Ratus Lima puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah* ), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.763.479.063 ( *Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah* ) dan Belanja Modal terealisasi Rp.969.457.487 ( *Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.5  
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	255.000.000	244.524.600	95,89	95,89
		Program Promosi Penanaman Modal	38.279.150	21.327.010	55,71	55,71
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	499.968.000	370.519.014	74,11	74,11
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	159.761.100	158.840.000	99,42	99,42
		Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	9.681.400	9.661.500	99,79	99,79

Total anggaran belanja adalah Rp. 962.689.650,- dengan realisasi Rp. 804.872.124,- atau dengan capaian sebesar 85% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Harga yang tertera di Standar harga terlalu tinggi dibanding dengan harga pasar sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100%.

### **3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,36 %	0 %	0			
Sasaran : Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA )	1 Perusahaan	2 Perusahaan	200	293.279.150	265.851.610	75,80
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	40,26%	40,26%	100	255.000.000	244.524.600	95,89
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	10 %	10	200	38.279.150	21.327.010	55,71
Sasaran : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	9.450.000.000.000,-	3.386.922.760.000, -	35	499.968.000	370.519.014	74,11

Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi Kota Dumai	100 %	35 %	35	499.968.000	370.519.014	74,11
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan	B	A	100	169.442.500	168.501.500	99,42
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	95,54	118			
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	80 %	1.200 Pemohon	100	159.761.100	158.840.000	99,42
Program : Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	100 %	25%	25	9.681.400	9.661.500	99,79

### 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tingkat efisiensinya adalah 132% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (75,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama* Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah) yaitu tingkat efisiensinya adalah 47% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (35%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 ( 74,11%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu tingkat efisiensinya adalah 119% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 ( 99,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

### 6.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1  
Prestasi dan Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1				
2				
3				
4				

## BAB IV PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## LAMPIRAN

### Kegiatan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha



### Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha



### Pelayanan Terhadap Pelaku Usaha



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	2
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	9,450,000,000,000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81

Dumai, 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DUMAI**



*Hendra*  
**HENDRA, S. Sos., M. Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196607241986021002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA, S. Sos., M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
  
  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

**Pihak Pertama,**  
  
  
**HENDRA, S. Sos., M. Si**  
NIP. 19560724 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA )	Perusahaan	1
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	9.450.000.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81

1 Sasaran 1  
Meningkatnya  
Investor di Kota  
Dumai

<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>90.000.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>Rp.</b>	<b>55.000.000</b>
1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp.	55.000.000
<b>1.2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.000.000</b>
1.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp.	35.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.279.150</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.279.150</b>
2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp.	20.159.150
2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	18.120.000

2 Sasaran 2  
Meningkatnya  
Realisasi  
Investasi di Kota  
Dumai

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>73.068.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>73.068.000</b>
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	22.999.650
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	25.068.500
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	24.999.850

Kualitas  
Pelayanan atas  
Perizinan dan  
Non Perizinan

4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Rp.	79.761.100
4.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	79.761.100
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	19.600.000
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Rp.	20.400.000
4.1.3	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp.	39.761.100
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Rp.	9.681.400
5.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	9.681.400
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.	9.681.400
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	290.789.650





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangn dibawah ini:

Nama : **HENDRA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

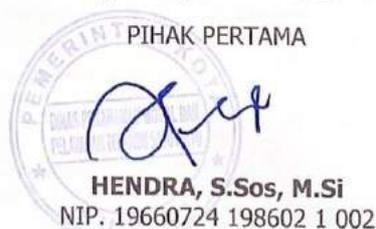
Nama : **H. FAISAL, SKM, MARS**  
Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama* Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

*Pihak Pertama* pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalm dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*

*Pihak Kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	1
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	9.450.000.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Peizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81

## Sasaran 1

1.	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	<b>1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp. 255.000.000</b>
		<b>1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 220.000.000</b>
		1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 220.000.000
		<b>1.2 Pembuatan Peta potensi Investasi kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 35.000.000</b>
		1.2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000
		<b>2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp. 38.279.150</b>
		<b>2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 38.279.150</b>
		2.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp. 20.159.150
		2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.120.000

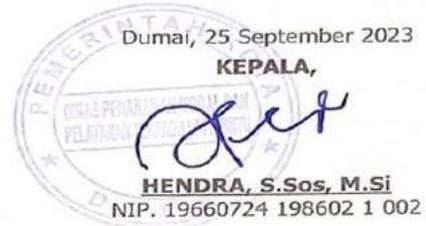
## Sasaran 2

2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	<b>3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp. 499.968.000</b>
		<b>3.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 499.968.000</b>
		3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 22.999.650
		3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 407.086.000
		3.1.3 Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 69.882.350

## Sasaran 3

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Peizinan Dan Non Perizinan	<b>4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>159.361.100</b>
		<b>4.1 Pelayanan Perizinan dan No Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>159.361.100</b>
		4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.600.000
		4.1.2 Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	60.000.000

4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		59.761.100
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Rp.	<b>9.681.400</b>
5.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	<b>9.681.400</b>
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.	9.681.400



**MATRIK RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**VISI** : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).  
**MISI** : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Industri Dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik  
**SASARAN** : Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Ket	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	
Meningkatkan pertumbuhan investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Realisasi PMDN Tahun evaluasi dikurang Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi dibagi Realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali seratus persen	3%	3,25%	3,54%	4,36%	4,70%	4,80%	5,04%	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA )	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	0	1 Perusahaan	Optimalisasi Penyusunan RUPM Daerah dan Peta Potensi serta Pelaksanaan pameran Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Penyusunan Peta Potensi investasi daerah serta peningkatan penyelebaran pameran terhadap potensi investasi daerah serta lebih melakukan pengawasan terhadap penanaman modal yang ada	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Prongram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan	Nilai interval konversi IKM	Kategori B	Kategori B	Kategori B	Kategori B	Kategori B	Kategori B	Kategori B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi Per unsur dibagi Total unsur yang terisidikal nilai penimbang	80	81,5	81	81	82	82	82	Optimalisasi sarana dan prasarana serta SOP Pelayanan	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dan penyebarluasan data informasi investasi secara digital	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal		

Dumai, 08 Januari 2024  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai  
  
 HENDRA, S. Fos, M.Si  
 Esplanade Utama Muda/IV  
 No. 19660204 198602 1 002



## Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022			2023		
	URAIAN	INDIKATOR	Realaisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA )	1	100	1	1	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	13.058.828.385.000	153.54	9.450.000.000.000	3.386.922.760.000	35	Tidak Berhasil
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85	105	81	95,40	118	Sangat Berhasil

*Jumlah Nilai investasi 2023 masih sampai Triwulan III*

Kota Dumai, 8 Januari 2024  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/IV.c  
 NIP.19660724 198602 1 002

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,36 %	0 %	0			
Sasaran : Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA )	1 Perusahaan	2 Perusahaan	200	293.279.150	265.851.610	75,80
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	40,26%	40,26%	100	255.000.000	244.524.600	95,89
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	10 %	10	200	38.279.150	21.327.010	55,71
Sasaran : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	9.450.000.000.000,-	3.386.922.760.000, -	35	499.968.000	370.519.014	74,11

Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi Kota Dumai	100 %	35 %	35	499.968.000	370.519.014	74,11
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan	B	A	100	169.442.500	168.501.500	99,42
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	95,54	118			
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	80 %	1.200 Pemohon	100	159.761.100	158.840.000	99,42
Program : Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	100 %	25%	25	9.681.400	9.661.500	99,79

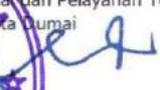
Kota Dumai, 8 Januari 2024  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
  
**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/IV.c  
 NIP.19660724 198602 1 002

**PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.910.673.321</b>	<b>8.900.002.367</b>	<b>81,57%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.972.450</b>	<b>48.428.550</b>	<b>47,49%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.043.350	8.078.450	58%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.486.450	9.178.350	68%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.991.000	7.184.300	6537%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.051.300	4.771.700	40%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.361.050	4.062.850	76%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.089.500	8.133.300	43%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.949.800	7.019.600	26%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.642.142.656</b>	<b>5.078.488.593</b>	<b>90,01%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.622.231.356	5.059.385.193	89,99%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.924.800	9.514.300	95,86%
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.986.500	9.589.100	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>39.995.700</b>	<b>38.060.350</b>	<b>95,16%</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.200	9.224.600	92,25%
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.000	9.525.000	95,26%
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.998.500	9.504.750	95,06%
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.000	9.806.000	98,07%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.040.234.550</b>	<b>989.329.732</b>	<b>95,11%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	197.832.050	184.450.775	93,24%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.388.700	151.429.800	92,68%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.971.000	78.606.300	97,08%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.650.800	60.368.000	97,92%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.500.000	195.166.560	97,83%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.362.000	5.638.000	88,62%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.530.000	313.670.297	94,90%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.125.208.000</b>	<b>1.094.617.487</b>	<b>97,28%</b>
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96%
2	Pengadaan Mebel	100.000.000	99.999.487	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	319.955.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	549.503.000	99,91%

6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.744.779.965</b>	<b>1.457.118.855</b>	<b>53,09%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.847.400	4.152.000	71,01%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.251.038.805	222.565.815	17,79%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.487.893.760	1.230.401.040	82,69%
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.340.000</b>	<b>193.958.800</b>	<b>89,65%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000	38.525.000	99,99%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.020.000	107.869.000	99,86%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.790.000	47.564.800	68,15%
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>255.000.000</b>	<b>244.524.600</b>	<b>95,89%</b>
1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>220.000.000</b>	<b>210.214.600</b>	<b>95,55%</b>
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	220.000.000	210.214.600	
2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.310.000</b>	<b>98,03%</b>
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.000.000	34.310.000	98,03%
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>38.279.150</b>	<b>21.327.010</b>	<b>55,71%</b>
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>38.279.150</b>	<b>21.327.010</b>	<b>55,71%</b>
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	20.159.150	4.006.550	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	18.120.000	17.320.460	95,59%
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>159.761.100</b>	<b>158.840.000</b>	<b>99,42%</b>
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>159.761.100</b>	<b>158.840.000</b>	<b>99,42%</b>
1	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	39.600.000	39.478.000	99,69%
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	60.400.000	60.300.000	99,83%
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	59.761.100	59.062.000	98,83%
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>499.968.000</b>	<b>370.519.014</b>	<b>74,11%</b>
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>499.968.000</b>	<b>370.519.014</b>	<b>74,11%</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	22.999.650	19.253.938	83,71%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	407.086.000	307.252.460	75,48%

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	69.882.350	44.012.616	62,98%
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>9.681.400</b>	9.661.500	99,79%
1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.681.400</b>	9.661.500	99,79%
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.681.400	9.661.500	99,79%

Dumai, 08 Januari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Kota Dumai  
  
HENDRA, S.Sos., M.Si  
Pemula Utama Muda/IVc  
NIP. 19660724 198602 1 002

